

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan

Lia Kartika¹, Abd. Rahim², Sri Astuty³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar

Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan

E-mail liakartikaaa10@gmail.com

Abstrak: Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi adalah jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor Transportasi. Untuk analisis digunakan data sekunder berupa time series 2010-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB sektor transportasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang memadai, tetapi itu saja belum cukup untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini diperlukan tindakan yang terarah dan terencana (Gilarso, 2004:331). Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat dan sejahtera tersebut, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan bermotor kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah propinsi di dasarkan pada peraturan daerah propinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah propinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang keputusan pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada propinsi tersebut. Oleh sebab itu setiap pemerintah diberikan kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur tentang perpajakan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potesial. Dalam hal ini penerimaan daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat di setiap daerah. Pajak kendaraan bermotor juga dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya seakan sepeda motor awalnya kebutuhan tersier mulai meranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaraan bermotor.

Setiap daerah termasuk daerah setingkat provinsi yang memiliki sumber potensi pajak kendaraan bermotor akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor termasuk sumber utama PAD setiap daerah di lar potensi alam seperti tambang dan kekayaan alam lainnya. Pajak kendaraan bermotor besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah jumlah kendaraan bermotor itu sendiri, jumlah penduduk (dengan asumsi jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di daerah tertentu), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan.

Dalam perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya di Propinsi Sulawesi Selatan, tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.

Berdasarkan data kependudukan dari BPS menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar ke tujuh di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 8.690.300 penduduk. Dengan luas wilayah 45.519,24 km² sehingga menjadikan penduduk di Sulawesi Selatan tergolong padat. Keadaan ini memicu meningkatnya perekonomian di Sulawesi Selatan sehingga jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pun meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data table 1.1 di bawah ini mengenai jumlah kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2018.

METODE

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diolah dan diterbitkan oleh lembaga yang berkaitan yang diperoleh dari penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pusat Statistik di Sulawesi Selatan. Data tersebut berupa data time series dari tahun 2010-2018, dimana untuk menunjang data tersebut penulis juga melakukan studi kasus sehingga dengan data yang tersedia inilah penulis menganalisis permasalahan yang ada

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu:

a. Jumlah Kendaraan Bermotor

kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jumlah kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah Sulawesi Selatan atau kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, di ukur dalam satuan unit

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang ada di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Sulawesi Selatan, jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu Daerah/Wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa.

c. PDRB Sektor Transportasi

PDRB sektor transportasi merupakan kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai danau maupun udara serta jasa penunjang angkutan. PDRB Sektor Transportasi disini dihitung atas dasar harga

konstan dan diukur dalam satuan rupiah yang diperoleh dari BPS.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi berganda. Untuk menguji dan menganalisis data peneliti menggunakan software SPSS.

Untuk mengetahui pengaruh Jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PPKB = \alpha + \beta_1 JKB + \beta_2 JP + \beta_3 PDRB + e$$

Keterangan;

PPKB	=	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
a	=	Konstanta
JKB	=	Jumlah Kendaraan Bermotor
JP	=	Jumlah Penduduk
PDRB	=	PDRB sektor transportasi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi variabel yang digunakan
e	=	variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji Koefisien Determinasi R^2 dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent yaitu jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi dalam menjelaskan atau memprediksikan variabel dependen yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi R^2

diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,8% variabel dependen pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi. Sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model dalam penelitian ini.

2. Uji Statistik

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pdrb sektor transportasi) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil uji signifikansi simultan (Uji f).

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas, tabel F sebesar 226.390 dan nilai Ftabel yaitu 4, jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai yaitu $226.390 > 4,76$ dengan tingkat signifikan 0.000^b lebih kecil dari nilai signifikansinya 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial atau uji t dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pdrb sektor transportasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor atau variabel dependen secara parsial atau masing-masing. Jika uji Thitung > Ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima begitupun sebaliknya jika Thitung < Ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

a) Pengaruh antara jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel uji T dapat dilihat nilai Thitung variabel X₁ atau jumlah kendaraan bermotor lebih kecil dari nilai Ttabel ($-2.357 > 2.016$) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dan nilai signifikannya ($0,065 < 0,1$). Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b) Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh Nilai Thitung variabel X₂ atau jumlah penduduk lebih besar dari nilai Ttabel ($2.827 > 2.571$) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dan nilai signifikannya ($0,037 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

c) Pengaruh PDRB Sektor Transportasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh Nilai Thitung variabel X₃ lebih besar dari Ttabel ($4.127 > 2.571$) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dan nilai signifikannya lebih kecil dari yang sudah diisyaratkan ($0,009 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pdrb sektor transportasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi yang

memperngaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Jumlah kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.
2. Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.
3. PDRB sektor transportasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.
4. Jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB Sektor Transportasi memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilur penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih luas atau akurat.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode pengamatan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat
3. Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat memperhatikan faktor jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor, dengan cara tetap memperhatikan dan melakukan eksensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Arbab, A. (2018, 11 22). Jumlah Kendaraan Makassar Capai 1 juta unit. Retrieved from CELEBESMEDIA.ID, Makassar: <http://www.celebesmedia.id>, Makassar
- Badan Pendapatan Daerah, (2018). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2018) Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2018. Sulawesi Selatan : Badan Pusat Statistik.
- Gilasro, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kansius.
- Giovani, Dinda Rezki. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12
- Halim, A. (2011). Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Indra, D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yng Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

- Meulaboh, Aceh Barat:
Universitas Teuku Umar.
- Nastiti, R. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4, 1-19.
- Nurrohman, A. (2010). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota surakarta (tahun 1994-2007). surakarta: universita sebelas maret.
- Putri, A. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor Studi Pada WPOP
- Suharno. (2003). Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta. UU No. 22. 2009.
- Tri, B. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2013). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Utami, A. T. (2014). analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa tengah. semarang: universitas diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta : Departemen Keuangan
- UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Yanti, Febri. (2014). Analisis Efektifitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Volume 14 No.2 / September 2014.

